

Article

Pelaksanaan Program Gizi Dalam Upaya Penurunan Stunting Menggunakan Pendekatan POAC di Puskesmas Bangkalan

Nurul Himayah¹, Eka Suci Daniyanti², Eddy Moeljono³

¹⁻³Administrasi Kesehatan, Universitas Noor Huda Mustofa

SUBMISSION TRACK

Received: April 03, 2026

Final Revision: April 12, 2026

Available Online: April 25, 2026

KEYWORDS

Nutrition Program, Stunting, POAC

CORRESPONDENCE

E-mail: ekasucidaniyanti@gmail.com

ABSTRACT

Stunting is a chronic nutritional problem that has a long-term impact on child growth and development. At the Bangkalan Community Health Center, 5.61% of toddlers suffer from stunting. The study aims to analyze nutrition program management in efforts to reduce stunting through management functions: planning, organizing, implementing, and supervising. The study uses a descriptive qualitative method. Subyek were selected purposive, including the head of the community health center, the nutrition program coordinator and the head of administration. Source triangulation included the person in charge of nutrition at the health office and the regional village midwife. Data was collected through interviews, observations, and documentation in June 2025 at the Bangkalan Health Center. Data analysis: reduction, presentation, drawing conclusions. The results show that planning was carried out through problem analysis, performance evaluation, and monthly reports incorporated into the RUK, but there was a lack of cross-sector participation. The formation of a cross-sector TPPS with clear division of tasks constituted organization. Implementation was carried out through nutrition education activities, PMT, home visits, and prenatal classes. However, there is a need to enhance community participation, strengthen cross-sectoral coordination to optimize interventions, particularly in planning and implementation management.

I. INTRODUCTION

Golden age merupakan masa berkembangnya intelegensi setiap individu pada seribu hari pertama kelahiran anak. Pada masa ini menjadi kunci pengembangan kompetensi, kemampuan berbahasa, bersikap dan kesadaran sosial. Pola asuh yang kurang maksimal berdampak pada buruknya tumbuh kembang anak (Lating et al., 2023). Stunting pada anak ketika pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan standar dunia (Anisa et al., 2024). Hingga tahun 2024, angka stunting di Indonesia belum berhasil menyentuh target target penurunan 14%. Data Survei Kesehatan

Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stunting secara nasional berada di angka 21,5 hanya menyusut 0,8 bila dibandingkan periode sebelumnya (Nurmansyah et al., 2024). Indonesia merupakan negara urutan kedua dengan jumlah prevalensi kasus stunting pada anak usia dibawah lima tahun di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan angka stunting sebesar 48,8% (Andarini et al., 2025). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2024, kabupaten Bangkalan terdapat 1783 kasus stunting dan di Puskesmas Bangkalan merupakan salah satu Puskesmas yang terdapat kejadian kasus stunting sebanyak 254 anak mengalami stunting terdiri dari 54

anak mengalami tinggi badan sangat pendek dan 200 anak mengalami tinggi badan pendek.

Kejadian stunting sangat berdampak terhadap kemampuan anak diantaranya anak memiliki tingkat belajar yang rendah, prestasi akademik yang buruk, serta produktivitas yang rendah saat dewasa. Dampak ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian stunting tidak hanya berdampak pada masalah Kesehatan akan tetapi juga berdampak pada masalah ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu upaya mengatasi stunting, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor seperti Kesehatan, Pendidikan, pertanian, dan ekonomi (Dekasari et al., 2024).

Sebagai respon strategis, pemerintah meluncurkan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang memuat sejumlah arah kebijakan : menekan prevalensi stunting, membenahi kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, memastikan pemenuhan asupan gizi, mereformasi pola asuh, memperluas akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta mendorong ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak (JDIH BPK, 2021).

Optimalisasi manajemen dalam penurunan stunting oleh Pemerintah Desa Banfau menunjukkan bahwa manajemen dalam penurunan stunting telah memenuhi tahapan fungsi manajemen. Perencanaan program dibangun diatas fondasi lima pilar strategi percepatan penurunan stunting. Dalam hal pengorganisasian, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting melibatkan ekosistem luas: kantor BKKBN, Dinas Kesehatan, Tim pertahanan, kader, kepala desa, TPK, camat, Puskesmas, tokoh agama, tokoh adat hingga

masyarakat umum. Adapun pengawasan dijalankan melalui dua jalur, yaitu langsung maupun tidak langsung (Nalle et al., 2024).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen program gizi dalam upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan.

II. METHODS

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan deskriptif untuk menggambarkan manajemen program gizi dalam upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan. Pada penelitian ini terdapat dua informan yakni informan kunci dan utama. Informan kunci adalah pihak yang menguasai gambaran menyeluruh atas persoalan yang diteliti, sedangkan informan utama merujuk pada individu yang memahami seluk-beluk teknis dan rincian mendalam dari masalah penelitian yang dikaji (Heryana, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala puskesmas Bangkalan sedangkan yang menjadi informan utama adalah Koordinator Gizi, kepala tata usaha Puskesmas Bangkalan. Triangulasi yang digunakan yakni teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber difungsikan untuk memverifikasi kredibilitas data dengan cara menyilangkan informasi dari berbagai titik perolehan, seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen pendukung lainnya (Ngan & Sari, 2022). Triangulasi penelitian melibatkan penanggung jawab program gizi Dinas Kesehatan dan tiga bidan desa Kramat, Ujung piring, Kraton (desa dengan nilai stunting tertinggi). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan pengumpulan data lebih lanjut oleh peneliti dengan reduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan.

III. RESULT

Perencanaan

Proses perencanaan program dalam upaya penurunan stunting dengan menggunakan data dari hasil evaluasi kinerja program yang telah dituangkan dalam RUK dengan metode brainstorming dan menggunakan USG untuk menentukan prioritas masalah dan kemudian akan menjadi rencana usulan kegiatan tahun 2026, berikut kutipan wawancara dari informan "U2":

"Evaluasi kinerja 2024 dibahas tahun 2025 melalui pertemuan PJ dan brainstorming dengan metode USG untuk menetapkan prioritas masalah dalam pembuatan RUK".

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan U2 jika upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan didukung dengan adanya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) penurunan stunting yang telah dibuat oleh tim gizi, pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti jika terdapat RUK pencegahan dan penurunan stunting. Berikut adalah RUK penurunan stunting Puskesmas Bangkalan



Gambar 4.1 Rencana Usulan Kegiatan penurunan Stunting

Perencanaan program dengan menggunakan metode brainstorming

dengan menggunakan USG. Berbeda dengan pernyataan informan kunci yang mana proses perencanaan yang dilakukan oleh pj program yang menyusun usulan kegiatan yang dibahas saat kegiatan minlok di Pukesmas. Berdasarkan kutipan wawancara dari informan "K":

"Perencanaan dilakukan oleh PJ program yang menyusun usulan kegiatan dan bahas dalam rapat minlok"

Minilokakarya Puskesmas bisa digunakan untuk momen kegiatan yang membahas usulan kegiatan oleh PJ program. Pihak desa atau bidan desa hanya menyampaikan data yang ada lapangan dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kutipan wawancara dari informan "T3":

"Rencana kegiatan biasanya dilakukan oleh tim gizi, kami di desa biasanya diminta menyampaikan data lapangan dan kebutuhan masyarakat"

Pendataan terkait kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh tim gizi merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan program gizi di Puskesmas. Perencanaan program gizi di Puskesmas juga melakukan analisis masalah dengan memvalidasi ulang data balita atau pemantuan status balita yang sudah dilaporkan oleh bidan desa Puskesmas Bangkalan. Berikut kutipan wawancara dari informan "U2":

"Analisis masalah dilakukan dengan validasi data dan pencocokan status pemantuan gizi, lalu disampaikan oleh tim desa dan tim gizi data stunting yang benar-benar akurat, by name by address"

Validasi data status pemantuan gizi berdasarkan kesesuaian nama dan alamat balita dan ibu hamil. Berbeda dengan pernyataan informan kunci yang menyatakan jika analisis masalah dilakukan dengan menerima laporan setiap bulan yang akan dilaporkan ke dinas kesehatan. Berikut kutipan wawancara dari informan "K":

“Analisis masalah dengan menerima laporan setiap bulan tentang program gizi dan akan dilaporkan ke dinas kesehatan”.

Laporan kegiatan program gizi yang akan diserahkan ke dinas kesehatan digunakan dasar untuk melakukan analisis masalah stunting di Puskesmas Bangkalan. Pernyataan tersebut dipertegas dengan jawaban informan triangulasi, jika perencanaan program gizi untuk penurunan stunting diawali dengan analisis masalah dengan melihat trend prevalensi stunting. Berikut kutipan wawancara dari informan “T1”:

“Untuk proses analisis dengan melihat trend prevalensi stunting, cakupan gizi, status gizi balita, serta hasil survei lapangan”

Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk melakukan analisis perencanaan program gizi di Puskesmas Bangkalan dalam upaya penurunan stunting. Koordinasi lintas sektor dilakukan setelah rencana usulan kerja di buat oleh PJ program. Berikut kutipan wawancara dari informan “U2”:

“Melakukan koordinasi lintas sektor jika sudah menjadi rencana usulan kerja yang dibuat oleh Pj Program”

Koordinasi dilakukan setelah proses perencanaan. Berbeda yang disampaikan oleh informan triangulasi yang menyatakan bahwa perencanaan program gizi dilakukan dengan koordinasi dengan lintas program yang dilakukan di internal Puskesmas. Berikut kutipan wawancara dari informan “T1”:

“Tidak ada koordinasi formal dengan lintas sektor dalam proses perencanaan, puskesmas Menyusun kegiatan berdasarkan hasil evaluasi internal dan data yang dimiliki”

Penggunaan data dan koordinasi dijadikan dasar dalam proses perencanaan program gizi dalam Upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan.

Perencanaan program gizi di Puskesmas Bangkalan diawali dengan

validasi dan analisis data status gizi dari posyandu, kunjungan rumah, serta data ibu hamil KEK yang dikumpulkan bidan desa dan disampaikan ke tim gizi. Hasil validasi dibahas melalui brainstorming dan analisis USG untuk menentukan prioritas masalah, kemudian dituangkan dalam RUK. Pada tahap awal, lintas sektor belum dilibatkan secara formal dan hanya terlibat pada evaluasi internal. Perencanaan didukung SK dari kepala Puskesmas yang mengatur komunikasi dan koordinasi lintas sektor, menjadi dasar penggunaan media seperti WhatsApp group antara petugas gizi, bidan desa, dan pihak terkait.

Pengorganisasian

Pembagian kerja dalam upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan melibatkan berbagai OPD lintas sektor terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK), KUA dan BKKBN, berikut kutipan wawancara dari informan “U2”:

“Kegiatan ini diakomodir oleh OPD yang lain bukan hanya Dinas Kesehatan karena memang dari satgas BKL sudah dipastikan bahwa stunting bukan hanya miliknya Dinkes aja tetapi ada OPD yang lain juga yang ikut serta terkait pencegahan dan penurunan stunting diantaranya TPPKK, dinas DLH, dinas BKKBN ”

Tim Percepatan Penurunan Stunting tidak hanya di tingkat kecamatan akan tetapi juga terdapat di tingkat desa/ kelurahan yang melibatkan tenaga kesehatan terdiri dari bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader, berikut kutipan wawancara dari informan “U1”:

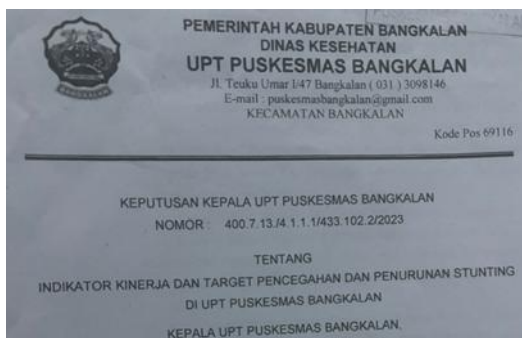
“Tim penurunan stunting yang ada di desa itu terdiri dari kader posyandu, kepala desa, bidan desa dan PPKBD “

Upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan didukung dengan tim percepatan penurunan stunting yang ditegaskan pada SK kepala Puskesmas Bangkalan. Berikut kutipan wawancara dari informan “T1”:

“Ya, masing-masing anggota tim memiliki tugas yang tertuang dalam SK kepala puskesmas, seperti edukasi gizi, pemantuan tumbuh kembang, pemberian PMT dan koordinasi dengan kader serta tokoh Masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan T1 jika upaya penurunan stunting di Puskesmas Bangkalan didukung dengan tim percepatan penurunan stunting yang telah dibuat surat keputusan oleh kepala puskesmas, pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti jika terdapat SK tersebut. Berikut adalah SK tim percepatan penurunan stunting:

Gambar 4.2 SK Indikator Kerja



Surat Keputusan atau SK pembagian dalam pelaksanaan program berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengatur dan menetapkan perincian tugas serta tanggung jawab individu atau suatu program.

Pengorganisasian program gizi dalam penuruna stunting sudah berjalan dengan cukup baik. Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) telah dibentuk di tingkat kecamatan maupun

desa. Tim ini melibatkan berbagai pihak seperti petugas puskesmas, kader, bidan, kepala desa, PPKBD, serta lintas sektor seperti BKKBN, PKK, dan pihak kecamatan. Pembagian tugas dalam tim sudah ditentukan dan masing-masing anggota memiliki peran sesuai fungsi dan tanggung jawabnya yang sudah diatur melalui surat keputusan (SK) kepala puskesmas Bangkalan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan program gizi di Puskemas Bangkalan dengan pemantuan remaja dalam program UKS dan juga pemberian tablet tambah darah dan pemberian PMT. Berdasarkan kutipan wawancara dari infoman “K”:

“Kesehatan remaja Perempuan di pantau melalui program UKS seperti pengukuran LILA, TB, BB dan pemberian tablet tambah darah”

Selain pemberian tabet tambah darah pelaksanaan juga dilakukan dengan melakukan koordinasi kepada bidan desa untuk melakukan pemantuan gizi terhadap balita yang memiliki kriteria stunting. Berdasarkan kutipan wawancara dari infoman “U1”:

“Proses pelaksanaan saya melakukan koordinasi dengan bidan desa untuk melakukan pemantuan gizi terhadap balita yang memiliki kriteria stunting”

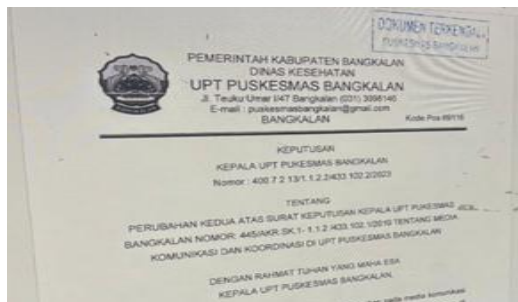
Koordinasi dalam pemantauan gizi balita oleh bidan desa merupakan salah satu pelaksanaan program gizi yang bertujuan sebagai upaya penurunan stunting. Sedangkan upaya lain yang juga dilakukan adalah melalui posyandu, kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan balita. Bidan desa melakukan pendampingan secara langsung dan bekerjasama dengan kader untuk memastikan balita mendapatkan layanan yang dibutuhkan. berikut kutipan wawancara dari informan “T2”:

“Kegiatan penurunan stunting dijalankan melalui posyandu, kunjungan rumah, serta kelas ibu hamil dan balita. Saya turut melakukan pendampingan secara langsung dan bekerjasama dengan kader untuk memastikan anak-anak mendapatkan layanan yang dibutuhkan”

Pemberian layanan kesehatan langsung oleh tenaga kesehatan bertujuan memastikan kondisi dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Selain itu koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor seperti sektor pendidikan, sanitasi, masyarakat dan BKKBN untuk memecahkan masalah kesehatan yang memerlukan dukungan dan realiasi dari lintas sektor, berikut kutipan wawancara dari informan “U2”:

“iya adanya koordinasi dan komunikasi dengan pihak lintas sektor yaitu dari BKKBN untuk penurunan stunting tetapi kita benar-benar butuh dukungan dan realisasi dari seluruh lintas sektor dan juga Masyarakat karena masalah ini tidak bisa dipecahkan dengan satu pihak saja tetapi kami juga butuh semua pihak yang berperan “

Pemecahan masalah stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tetapi membutuhkan dukungan dan realisasi dari masyarakat. Dengan demikian dibuat SK koordinasi dan komunikasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti jika sudah terdapat SK tersebut. Berikut adalah SK komunikasi dan



koordinasi:

Gambar 4.3 SK Media Komunikasi dan Koordinasi

Selain koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor, kerjasama dengan kader dan tim kesehatan menjadi indikator penting dalam upaya penurunan stunting pada balita di Puskesmas Bangkalan. Salah satu bentuk kegiatan kerjasama dengan kader berupa makanan tambahan (PMT) setiap balita yang mengalami stunting atau gizi buruk, berikut kutipan wawancara dari informan “K”:

“Iya di Puskesmas bekerjasama dengan kader dan juga tim kesehatan untuk menurunkan stunting dengan pemberian makanan tambahan atau PMT, setiap balita yang mengalami stunting atau gizi buruk “

Pemberian makanan tambahan kepada balita yang mengalami stunting atau gizi buruk oleh kader dan juga tim kesehatan merupakan salah satu bentuk koordinasi atau kerjasama yang telah dilakukan. Selain koordinasi atau kerjasama dengan kepala dusun atau tokoh masyarakat saat mengadakan penyuluhan, bidan desa juga melakukan pendekatan dengan masyarakat bersama kader. Berikut kutipan wawancara dari informan “T3”:

“Kami sering melakukan pendekatan ke masyarakat bersama kader, termasuk menggandeng kepala dusun atau tokoh agama saat mengadakan penyuluhan atau pertemuan”

Bekerjasama dengan kader untuk melakukan pelaksanaan program penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang stunting dilakukan di setiap posandu jika ada balita yang menderita stunting, dan juga disetiap tahun terdapat penyuluhan tentang stunting di desa, berikut kutipan wawancara dari informan “U1”:

“Penyuluhan tentang stunting seharusnya dilakukan didesa

masing” tapi setiap tahun ada undangan dari desa penyuluhan tentang stunting tetapi klo dari posyandu bidan yang melakukan penyuluhannya di waktu tertentu aja “

Penyuluhan yang dialukan setiap waktu tertentu dan juga setiap tahunya. Berbeda dengan pernyataan informan triangulasi 3 yang menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan setiap kegiatan posyandu dan juga saat kunjungan rumah dan juga kegiatan yang ada didesa. berikut kutipan wawancara dari informan “T3”:

“Penyuluhan rutin tiap bulan di posyandu, juga saat kunjungan rumah dan kegiatan desa”

Selain melakukan penyuluhan setiap kegiatan posyandu. Terdapat motivasi dan dukungan aktif dari kepala puskesmas terhadap program penurunan stunting melalui pemberian arahan, memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Berikut kutipan wawancara dari informan “T2”:

“Kepala puskesmas dan atasan kami bagian KIA dan gizi sangat mendukung, mereka memberikan pengarahan saat pertemuan bulanan dan ikut memantau kegiatn lapangan”

Meskipun terdapat dukungan dan motivasi dari Kepala Puskesmas namun masih terdapat hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program gizi dalam upaya penurunan stunting kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program gizi. Berikut kutipan wawancara dari informan “U1”:

“Hambatannya dari Masyarakat yang diberikan edukasi tidak mendengarkan, kurangnya pasrtisipasi Masyarakat dalam kehadirannya disetiap penyuluhan”

Pelaksanaan program gizi meskipun sudah mendapatkan dukungan penuh dari kepala Puskesmas tetapi masih terdapat hambatan dalam

pelaksanaanya meliputi kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat dalam kegiatan posyandu dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Berikut kutipan wawancara dari informan “T2”:

“Hambatannya dari partisipasi masyarakat yang masih kurang, keterbatasan waktu dan tenaga kerana kegiatan sangat padat, serta adanya masyarakat yang belum sadar pentingnya pencegahan stunting”

Dalam pelaksanaan kegiatan program gizi di Posyandu, kunjungan rumah dan pemberian PMT masih terdapat hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu merupakan hambatan dalam upaya penurunan stunting.

Pelaksanaan program gizi di Puskesmas Bangkalan meliputi pemantuan pertumbuhan balita melalui posyandu, pemberian PMT bagi balita stunting, serta kelas ibu hamil dan ibu balita untuk edukasi gizi seimbang dan pencegahan stunting. Penyuluhan rutin dilakukan melalui posyandu dan kelas ibu hamil dan balita melibatkan bidan desa, kader kepala desa dan tokoh mnasyarakat.

Dukungan pimpinan Puskesmas terlihat dari pemberian SK tugas, fasilitas, serta pengawasan melalui miniloka bulanan dan evaluasi triwulanan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya partisipasi ibu balita dan keterbatasan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pemenuhan gizi.

Pengawasan

Evaluasi yang dilakukan program gizi di Puskesmas Bangkalan adalah dengan melaksanakan minlok lintas program, lintas sektor dan adanya pemantauan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN,

berikut kutipan wawancara dari informan “U1”:

“Iya jadi evaluasi program-program stunting yang dilakukan biasanya kami lakukan dalam minlok lintas program, lintas sektor dan ada pemantauan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN”

Evaluasi program stunting sangat penting dilakukan pada lintas program dan lintas sektor untuk memastikan ketercapaian dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini juga dipertegas dengan pernyataan informan triangulasi jika evaluasi dilakukan setiap triwulan melalui laporan capaian program dan evaluasi tahunan juga dilaksanakan untuk menyusun kegiatan tahun berikutnya. Berdasarkan kutipan wawancara dari informan “T1”:

“Evaluasi dilakukan setiap triwulan melalui laporan capaian program dan evaluasi tahunan juga dilaksanakan untuk Menyusun kegiatan tahun berikutnya”

Pelaporan capaian program dan evaluasi tahunan dijadikan dasar untuk Menyusun kegiatan tahun berikutnya. Selain evaluasi Puskesmas juga melakukan tindak lanjut terhadap penurunan dan pencegahan stunting dengan cara melakukan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kunjungan rumah dan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), berikut kutipan wawancara dari informan “U1”:

“Tindak lanjut dengan melakukan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kunjungan rumah, pemberian PMT”

Kegiatan yang dilakukan oleh bidan desa merupakan tindak lanjut dalam upaya penurunan stunting yang bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Informan triangulasi juga mengatakan hal yang sama bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh puskesmas Bangkalan dengan melakukan kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan balita, pemberian PMT. Berikut kutipan wawancara dari informan “T4”:

“ya, dengan melakukan kunjungan rumah dan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dan pemberian makanan tambahan atau PMT”

Kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan ibu balita dan pemberian PMT merupakan tindak lanjut yang dilakukan di Puskesmas Bangkalan. Berbeda dengan pernyataan informan triangulasi 1 yang menyatakan bahwa tindak lanjut dilakukan melalui rapat evaluasi dan supervise puskesmas yang belum mencapai target. Berikut kutipan wawancara dari informan “T1”:

“Tindak lanjut melalui rapat evaluasi dan supervise, puskesmas yang belum mencapai target”

Upaya puskesmas untuk mencapai target penurunan stunting dengan melakukan rapat evaluasi dan supervise.

Pengawasan dalam program gizi dilakukan secara rutin melalui monilokakarya bulanan, monitoring dan evaluasi triwulanan serta pendampingan langsung kelapangan. Tim gizi bersama penanggung jawab program dan kepala puskesmas mengevaluasi capaian kegiatan, kendala pelaksanaan, dan menetapkan tindak lanjut seperti pemberian tambahan PMT, penyuluhan ulang, atau kunjungan rumah.

Semua proses pelaporan kegiatan telah dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh dinas Kesehatan. Laporan disusun oleh bidan desa dan kader kemudian dilaporkan ke puskesmas secara berkala melalui sistem tersebut.

IV. DISCUSSION

Perencanaan program gizi di Puskesmas Bangkalan diawali dengan validasi dan analisis data status gizi dari posyandu, kunjungan rumah, serta data ibu hamil KEK yang dikumpulkan bidan desa dan disampaikan ke tim gizi. Hasil validasi dibahas melalui brainstorming dan analisis USG untuk menentukan prioritas masalah, kemudian dituangkan dalam RUK. Pada tahap awal, lintas sektor belum dilibatkan secara formal dan hanya terlibat pada evaluasi internal. Perencanaan didukung SK dari kepala Puskesmas yang mengatur komunikasi dan koordinasi lintas sektor, menjadi dasar penggunaan media seperti WhatsApp group antara petugas gizi, bidan desa, dan pihak terkait.

Perencanaan puskesmas merupakan suatu proses merumuskan masalah Kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritas masalah, menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja Puskesmas. Dengan adanya perencanaan maka dapat dipastikan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik dan efektif (Anisa et al., 2024). Hal ini diperkuat dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa upaya penurunan stunting harus dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan lintas sektor dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal proses perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang bertujuan untuk menetapkan kebutuhan obat sesuai dengan kondisi dan data yang ada. Dalam konteks instalasi farmasi,

perencanaan dilakukan dengan memperhatikan stok obat, pola penggunaan, serta kebutuhan pelayanan rumah sakit (Daniyanti et al., 2022). Perencanaan program di Puskesmas membutuhkan keterlibatan lintas sektor guna menghasilkan rumusan analisis masalah yang akan diselesaikan. Minilokakarya Puskesmas juga digunakan untuk kegiatan perencanaan dari suatu program Puskesmas. Perencanaan yang baik selain digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan juga dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang baik dan efektif. Perencanaan dalam suatu program kegiatan juga bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan dari program tersebut karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Pengorganisasian program gizi dalam penurunan stunting sudah berjalan dengan cukup baik. Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) telah dibentuk di tingkat kecamatan maupun desa. Tim ini melibatkan berbagai pihak seperti petugas puskesmas, kader, bidan, kepala desa, PPKBD, serta lintas sektor seperti BKKBN, PKK, dan pihak kecamatan. Pembagian tugas dalam tim sudah ditentukan dan masing-masing anggota memiliki peran sesuai fungsi dan tanggung jawabnya yang sudah diatur melalui surat keputusan (SK) kepala puskesmas Bangkalan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana, tim

penggerak pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya (JDIH BPK, 2021).

Pengorganisasian berkaitan dengan penataan dan pembagian tugas agar obat dapat tersimpan, terjaga mutunya, serta mudah didistribusikan. Hal ini termasuk pengelompokan obat berdasarkan jenis persediaan, stabilitas, maupun metode penyimpanan seperti FIFO dan LIFO (Daniyanti et al., 2022).

Pengorganisasian dalam program gizi merupakan aspek penting yang menentukan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, serta pembagian tugas yang jelas antara petugas gizi, kader dan pihak lintas sektor sangat mempengaruhi efektivitas program. Tetapi dalam praktiknya, keberhasilan pengorganisasian sangat dipengaruhi oleh dukungan dari lintas sektor termasuk komitmen pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan organisasi. Tanpa kerjasama dari semua pihak kegiatan program bisa terhambat.

Dalam pelaksanaan kegiatan program gizi diposyandu, kunjungan rumah dan pemberian PMT masih terdapat hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu merupakan hambatan dalam upaya penurunan stunting.

Pelaksanaan program gizi di Puskesmas Bangkalan meliputi pemantuan pertumbuhan balita melalui posyandu, pemberian PMT bagi balita stunting, serta kelas ibu hamil dan ibu balita untuk edukasi gizi seimbang dan pencegahan stunting. Penyuluhan rutin dilakukan melalui posyandu dan kelas ibu hamil dan balita melibatkan bidan desa, kader kepala desa dan tokoh

masyarakat. Dukungan pimpinan Puskesmas terlihat dari pemberian SK tugas, fasilitas, serta pengawasan melalui miniloka bulanan dan evaluasi triwulanan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya partisipasi ibu balita dan keterbatasan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pemenuhan gizi.

Pelaksanaan program gizi di posyandu wilayah kerja puskesmas dilakukan dengan melibatkan tenaga Kesehatan dari Puskesmas, kader posyandu dan Masyarakat. Pelaksanaan yang dilakukan antara lain: pemenuhan gizi ibu hamil mencakup pemberian PMT dan pemberian tablet tambah darah, penyuluhan IMD, pola asuh terhadap bayi dan balita, pemantuan pertumbuhan balita, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, penerapan PHBS (Yusnadi & Anggraini, 2023). Keberhasilan tahap pelaksanaan sangat bergantung pada figur pemimpin yang tangguh, sosok yang mampu menggerakkan dan mengkoordinir tim agar bergerak sinergis sesuai arah rencana yang telah ditetapkan (Theresia et al., 2023).

Hasil penelitian (Daniyanti et al., 2022) pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari rencana yang telah dibuat. Tahap pelaksanaan program di Puskesmas memerlukan koordinasi dan peran aktif dari seluruh pelaksana yang terlibat agar kegiatan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan yang baik tidak hanya menunjukkan bagaimana kegiatan dijalankan tetapi juga menjadi gambaran sejauh mana puskesmas mampu mengimplementasikan rencana secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan dalam suatu program juga berfungsi sebagai langkah konkrit dalam mencapai tujuan karena seluruh kegiatan dilakukan sesuai arahan, pedoman teknis serta regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dalam program gizi dilakukan secara rutin melalui monilokakarya bulanan, monitoring dan evaluasi triwulanan serta pendampingan langsung kelapangan. Tim gizi bersama penanggung jawab program dan kepala puskesmas mengevaluasi capaian kegiatan, kendala pelaksanaan, dan menetapkan tindak lanjut seperti pemberian tambahan PMT, penyuluhan ulang, atau kunjungan rumah. Semua proses pelaporan kegiatan telah dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan. Laporan disusun oleh bidan desa dan kader kemudian dilaporkan ke puskesmas secara berkala melalui sistem tersebut. Pengawasan gizi di Puskesmas KPIK melalui monitoring dan evaluasi program stunting. Keberhasilan tahap pelaksanaan sangat bergantung pada figur pemimpin yang tangguh dan sosok yang mampu menggerakkan dan mengkoordinir tim agar bergerak sinergis sesuai arah rencana yang telah ditetapkan (Karmila & Hasnah, 2024).

Kegiatan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan dirancang sebagai mekanisme untuk memotret kemajuan dan keberhasilan percepatan penurunan stunting, sekaligus menyediakan umpan balik konstruktif bagi penyempurnaan pelaksanaan kedepannya. Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian agar pelaksanaan manajemen sesuai dengan perencanaan.

Pengawasan tidak hanya difungsikan sebagai evaluasi tetapi juga untuk menjaga kualitas pelaksanaan program agar tetap sesuai jalur. Selain itu pengawasan juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program karena dapat mengidentifikasi kekurangan atau hambatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan pengawasan yang terarah dan sistematis maka proses pencapaian tujuan program akan menjadi lebih efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Evaluasi penanggulangan gizi tidak hanya dilaksanakan pada evaluasi proses tetapi juga evaluasi terhadap output. Evaluasi proses dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung untuk mengetahui apakah metode yang dipilih sudah efektif, motivasi dan koordinasi lintas sektor, petugas gizi serta peran masyarakat sudah berjalan dengan baik sedangkan evaluasi output dilaksanakan setelah program telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui output, effect atau out come program sudah sesuai target yang telah ditetapkan (Fazilah et al., 2022).

V. CONCLUSION

Perencanaan disusun berdasarkan data posyandu dan masukan petugas gizi, tetapi keterlibatan lintas sektor belum optimal. Pengorganisasian dibentuk TPPS Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai peran dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan dilakukan melalui posyandu, pemberian PMT, kunjungan rumah, dan penyuluhan, tetapi masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya dukungan sektor lainnya. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui forum minilokakarya bulanan dan pertemuan lintas sektor setiap triwulan.

REFERENCES

- Andarini, D., Indris, H., Anggraini, R., & Permatasari, R. (2025). Kajian Pustaka : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 14(02), 63–69.
- Anisa, Salma, W. O., & Rahman. (2024). Analisis Manajemen Program Penanggulangan Stunting Di Puskesmas Benua-Benua Kota Kendari Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)*, 5(2), 232–241.
- Daniyanti, E. S., Firdaus, N., & Soliha, R. (2022). *Analisis Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUD Anna Medika Madura*.
- Fazilah, Z., Sudirman, & Lestari, A. (2022). Manajemen Penanggulangan Gizi Kurang Pasca Bencana di Puskesmas Talise Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05(06), 312–319.
- Heryana, A. (2019). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat [e-book] tidak dipublikasikan. In *Buku Ajar* (Vol. 2, pp. 1–190).
- JDIH BPK. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jdih BPK RI Database Peraturan.
- Karmila, T., & Hasnah, F. (2024). Gambaran Manajemen Program Penurunan Stunting pada Balita di Puskesmas KPIK Tahun 2022. *Appicare Journal*, 1(1), 1–7.
- Lating, Z., Dolang, M. W., Dusra, E., Hamka, H., & Saendrayani Santriawati, W. O. (2023). Analisis Manajemen Kejadian Stunting pada Balita di Desa Waesamu Tahun 2023. *Jurnal Medika Husada*, 3(2), 21–30.
- Nalle, N. A., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). Analisis Manajemen Penanggulangan Stunting Oleh Pemerintah Desa Banfau Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. *Journal of Management & Public Policy*, 13(2), 1–20.
- Ngan, I. V., & Sari, W. P. (2022). Analisis Komunikasi Pemasaran E-Commerce pada Brecht Indonesia. *KIWARA*, <https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Kiwari>, 1(2), 322–329.
- Nurmansyah, A., Sarinengsih, Y., Jamiyanti, A., Lengga, V. M., Agustin, D. N., W, D. A., A, T. Y., S, N. D., W, R. S., S, P. Della, Rizkia, T., Kurniawan, R., Fauziah, E., Herliyuandi, F., C, A. A., Rema, M., Mulyani, S., Widyastuti, Nurizky, L., ... Aisyah, S. (2024). Cegah Stunting Dengan Penanganan Yang Tepat Pada Masyarakat Dusun Barujati. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(12), 5539–5545.
- Theresia, T. T., Lestari, S., & Hutagaol, M. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Yang Berkaitan Dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Kecamatan Palmerah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 2332–2339.
- Yusnadi, & Anggraini, S. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sukaramai Kecamatan Medan Area. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 49–61. <https://doi.org/10.21831/diklus.v7i1.65669>